

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia terbentuk dengan salah satu komitmennya yaitu dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Namun disisi lain, Indonesia mempunyai salah satu masalah pada kesehatan yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan gizi, hingga menjadi salah satu faktor penghambat yang sangat kronis untuk terjadi kesejahteraan masyarakat. Permasalahan kesehatan pada gizi atau dikenal dengan stunting tersebut menjadi permasalahan kesehatan global yang terus menjadi topik atau fokus penting negara untuk segera dituntaskan. Berdasarkan data Global Nutrition Report (2018), negara Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki permasalahan beban ganda masalah gizi yang memiliki prevelensi stunting yang cukup tinggi sebesar 36,4 % di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2005 – 2017 dari 17 negara.

Permasalahan stunting yang terjadi tersebut perlu adanya tindakan dari pemerintah yang dapat dikatakan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan intervensi gizi untuk dapat menurunkan prevelensi angka stunting. Dalam upaya tindakan penanganan tersebut merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang terdapat di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020 – 2024. Diharapkan pada program tersebut terjadi penurunan pada kematian ibu hingga penurunan prevelensi stunting yang menjadi 14% pada tahun 2024.

Di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pada data terdapat desa lokus stunting pada tahun 2019 sebanyak 15 desa hingga pada tahun 2023 terdapat 19 desa lokus stunting yang tercatat. Berdasarkan data sebelumnya terlihat bahwa prevelensi stunting pada kabupaten tersebut terus mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2019 dimana pada saat itu angka prevelensi stunting tercatat sebesar 23,98 %, serta pada tahun 2020 sebesar 16,20% hingga tahun 2021 sebesar 10,94% (Barat, 2021). Bahkan dari data yang didapat mengatakan penurunan pada tahun ke tahun terjadi pula hingga tahun 2022, dimana angka prevelensi stunting turun jauh lebih rendah dari target nasional dimana mencapai angka 6,33% (Indonesia, 2022).

Demikian pula berdasarkan hal diatas, sesuai RPJMD Kotawaringin Barat 2017 – 2022 yang dimana juga memprioritaskan pencegahan stunting dalam program pembangunan daerah. Terkait prioritas tersebut dalam pencegahan dan penanganan stunting, pemerintah kabupaten Kotawaringin Barat dengan melalui program Jaga Hubungan Kerjasama Beraksi Tanggap Stunting atau Jaga Huma Betang yang dimana pada program tersebut dilakukan oleh Pemda bersama masyarakat dan dunia usaha supaya dapat terintegrasi dan berjenjang pada system perencanaan dan keterpaduan serta keterlibatan SOPD yang terkait seperti BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akademisi serta pihak media dan dunia usaha atau UMKM yang terkait. Dalam program pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tim percepatan penurunan stunting telah dijelaskan dalam bentuk Surat Keputusan yang mengatakan bahwa Dinas P3AP2KB menjadi

koordinator dalam implementasi program tersebut. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya dalam komitmen yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terkait tetapi juga melakukan peningkatan dalam alokasi anggaran kepada 17 SOPD yang terkait untuk kegiatan atau programnya.

Adapun kegiatan pengimplementasian dalam program yang dilakukan dan ditekankan oleh Pemda dalam pencegahan dan penanggulangan stunting seperti program inovasi dari komitmen 3 GO yaitu gerakan nol jamban di area bantaran sungai (goban), gerakan sanitasi aman kabupaten (gosak), dan gerakan barosih ratik (gobrak) selain itu pula juga melakukan penataan pada kawasan di area bantaran sungai menjadi daerah wisata, akses layak dan membuka daerah UMKM untuk pula meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Meski begitu, disisi lain berjalannya program Jaga Huma Betang yang dilakukan tidak lepas dari adanya kendala atau permasalahan yang terjadi disamping itu hingga kini dapat berjalan. Adapun kendala atau permasalahan yang terjadi pada program yang dilakukan yaitu luas wilayah dan kondisi daerah aliran sungai, proses mengubah cara pandang atau pola pikir serta perilaku sehari – hari masyarakat untuk dapat mendukung dan kerjasama dalam menjalankan program. Sekretariat Wakil Presiden dari Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia Dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi mengatakan bahwa untuk dapat menurunkan prevelensi stunting tersebut perlu adanya komitmen yang kuat antara kepala daerah yang didukung oleh DPRD dan Forkopimda melalui regulasi.

Adanya kendala serta permasalahan yang ada apakah pengimplentasian program “Jaga Huma Betang” yang dilakukan berjalan dengan efisien dan efektif

hingga angka prevalensi stunting menurun dengan dilakukannya komitmen atau kolaborasi yang melibatkan beberapa sektor dan masyarakat dimana permasalahan ini tidak hanya dapat diselesaikan oleh bidang kesehatan terlebih pula oleh pemerintah seperti hal diatas, hingga perlu keterlibatan dalam proses kolaborasi dengan stakeholders di luar pemerintahan yang terintegrasi sehingga stunting dapat dicegah atau dihilangkan dengan optimalisasi program tersebut. Maka berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, saya tertarik dalam penilitan ini mengangkat judul **“Collaborative Governance Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, adapun pokok permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu, untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi stakeholders dalam penanganan stunting di Kabupaten Kotawaringin Barat provinsi Kalimantan Tengah

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut yang dapat diambil yaitu dimana hasil yang didapatkan dalam penelitian dapat menjadi manfaat teoritis dalam

rangka pengembangan ilmu pemerintahan melalui studi tentang bagaimana proses Collaborative Governance pada penerapan program Jaga Huma Betang di Kotawaringin Barat serta menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran secara lebih lanjut bahkan menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan di Indonesia. Serta pula dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai materi dan media pembelajaran yang sesuai untuk peneliti dan pembaca.

1.5. Literatur Review

Pada penelitian ini terdapat literature yang sesuai pada masalah atau topic yang ada pada penelitian ini, yaitu dengan adanya permasalahan stunting yang dimana hingga saat ini masih belum terselesaikan dengan tuntas maka perlu adanya kolaborasi dari pemerintah dengan beberapa stakeholders yang perlu diproses untuk dapat mencegah terjadinya tingkat prevelensi stunting yang tinggi, sehingga akan diuraikan pada penelitian ini, yaitu:

Table 1.1 Literature Review

No	Penulis	Judul	Jurnal	Hasil Temuan
1	Abdul Rachman Saida (Saida, 2021)	Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Kabupaten Banggai	Journal of Tompotika: Social, Economics, and Education Science (JTSEES) Vol. 3 No. 5 (2022) Web Jurnal: http://jtsees.untika.ac.id/index.php/JTSEES	Dalam pencegahan stunting harus menjadi prioritas dalam pemerintahan dan stakeholders terkait karena dampak dari stunting sendiri tidak akan mempengaruhi kesehatan tetapi juga akan mempengaruhi social, ekonomi, politik dan pertahanan pemerintahan.

				<p>Untuk dapat melihat efektivitas kolaborasi yang dilakukan antar pihak atau stakeholders yang terkait dapat dilihat sesuai dengan teori De Seve, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Network Structure 2. Commitment to a common purpose 3. Trust among the participants 4. Kepastian pemerintahan 5. Access to authority 6. Cistibutive responsibility/ac cessibility 7. Sharing information 8. Access to resources
2	<p>Yurista Permanasari, Meda Permana, Joko Pambudi, Bunga Christitha Rosha, Made Dewi Susilawati, Ekowati Rahajeng, Agus Triwinarto, dan Rachmalina S. Prasodjo (Permanasari et al., 2020)</p>	<p>Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas</p>	<p>Vol. 30 https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/mpk/article/download/3586/2081/</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting tersebut, semua kabupaten prioritas yang menjadi sampel atau desa lokus stunting dalam penelitian tersebut belum mempunyai petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dari program pencegahan stunting. Sehingga belum ada koordinasi antara

				<p>lintas sektor terkait konvergensi dan koordinasi program pencegahan stunting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hal ini dikarenakan terjadinya koordinasi lintas sektoral yang optimal dimana dilatarbelakangi oleh adanya ego sektoral.
3	<p>Aprillia Kinanti, Rahmadani Yusran (Kinanti & Yusran, 2022)</p>	<p>Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat</p>	<p>Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 5 No. 3 2022 http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/720</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil dalam penelitian ini yaitu komitmen atau kebijakan yang belum terlaksanakan karena belum terfasilitas yang dilatarbelakangi oleh masyarakat yang belum memiliki pemahaman mengenai stunting. • Serta adapun peraturan bupati mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting di Nagari dimana bersifat partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumber daya local. Namun tidak tesusurkan pada masyarakat atau keluarga yang terkena stunting karena tidak dilakukan secara langsung di tempat lokus stunting.
4	<p>Dian Rosa Sunaryo,</p>	<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN</p>	<p>Jurnal Pemikiran Dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat OPD yang masih belum

	Candradewini, Ria Arifianti (Sunaryo et al., 2022)	PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN STUNTING DI KABUPATEN BANDUNG	Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, Volume 4 Nomor 4 Desember Tahun 2021 : 205 – 213 https://jurnal.unpad.ac.id/responsive/article/view/34716	memahami program atau regulasi yang ada hingga program serta sosialisasi masih belum menyeluruh tersalurkan • Adapun model implentasi yang dapat mempengaruhi implentasi dan suatu model dari kebijakan dari Van Meter dan Horn, sebagai berikut: 1. Standar kebijakan dan sasaran 2. Sumber daya 3. Komunikasi 4. Karakteristik 5. Lingkungan social, ekonomi dan politik
5	Fitriani Pramita Gurning, Rahmia Yunita Sari S,Rizky Widya Astuti, Ummu Balqis (Gurning, 2021)	IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANG AN STUNTING DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN TAHUN 2020	Jurnal Kesehatan, Vol. 10 No. 1 (2021). ISSN https://jurnal.uy.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/325	Hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu dalam menganalisis program yang dilakukan oleh OPD atau pihak yang terkait penulis menggunakan teknik analisis SWOT pada program yang dibentuk.
6	Cindy Fatika Sari, Susilawati (Sari & Susilawati, 2022)	Program Penanggulangan Stunting Melalui Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sumut	PUBHEALTH JURNAL KESEHATAN MASYARAK AT - VOL. 1 NO. 1 (2022) EDISI JULI https://jurnal.ilmubersama.com/index.php/P	• Hasil yang didapat yaitu dalam penelitian ini terdapat salah satu program yang dapat menurunkan stunting yaitu dengan program Sanitasi Total Berplatform

			ubHealth/article/view/34	<p>Masyarakat (STBM).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada penelitian tersebut terlihat menggunakan pendekatan yang dilakukan pada bapak – bapak sebagai kandidat stunting serta bimbingan pada masyarakat.
7	Yulfira Media dan Nilda Elfemi (Media et al., 2021)	PERMASALAHAN SOSIAL BUDAYA DAN ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING PADA BALITA DI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT	Jurnal Ekologi Kesehatan Vol. 20 No 1, Juni 2021: 56-68 https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/jek/article/view/4130	<p>Hasil dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa dimana masih terdapat permasalahan/hambatan yang terjadi pada daerah tersebut seperti sosial budaya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting karena diketahui pengetahuan pada masyarakat masih terbatas. Sehingga program yang dilakukan masih sangat dasar seperti sosialisasi kepada masyarakat.</p>
8	Febiyu Rahmanda, Fitriani Pramita Gurning(Rahmanda & Gurning, 2022)	Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Dalam Program Gerakan 1000 HPK di Puskesmas PagarJati	VOL. 1 NO. 1 (2022) EDISIJULI https://jurnal.ilubersama.com/index.php/PubHealth/article/download/28/34	<ul style="list-style-type: none"> • Diketahui hasil dari penemuan dalam penelitian tersebut yaitu dijelaskan bahwa angka prevalensi di Kabupaten Deli Serdang mengalami kenaikan sebesar 30,97%. • Program yang dilakukan tidak ada inovasi dimana hanya terdapat dua

				program dasar yang telah diusul oleh kemenkes seperti pemberian ASI eksklusif dan 100 HPK.
9	Taufik Hidayat, Any Zahrotul Widniah, Annisa Febriana (Hidayat et al., 2022)	Optimalisasi pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Sungai Tuan Ilir	Volume 3, Nomor 1, 13-18 http://jffk.unra.ac.id/index.php/indra	Pada penelitian tersebut program yang dilakukan di Desa Sungai Tuan Ilir dilakukan dengan pengabdian masyarakat seperti melakukan penyuluhan atau sosialisai serta kampanye mengenai kesehatan dan pencegahan dan penanggulangan stunting secara masal dengan komunikasi antar perorangan (KAP) dimana dilakukan dengan kunjungan rumah pada keluarga yang memiliki anak usia balita, usia produktif dan usia subur.
10	Sutantri, Zikri Alhawali, Chaidar Muhammad, Angelia Friska Tendean (Alhalawi et al., 2022)	Peningkatan Pengetahuan Tentang PMT Pada Kader Posyandu Kalurahan Sendangsari Sebagai Upaya Penanggulangan Stunting Melalui Self Help Group	Vol. 7, No. 3, 2022 URL: http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/	Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa program dilakukan dengan pengabdian masyarakat dengan metode pendekatan kesehatan dengan kader posyandu dimana pendekatan tersebut pada program pengolahan makanan PMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengetahuan penanggulangan stunting pada kader posyandu Sendangsari

				mengenai PMT melalui SHG.
11	Brian Sri Prahastuti (Prahastuti, 2020)	KAJIAN KEBIJAKAN: KEMITRAAN PUBLIK SWASTA PENANGGULANGAN STUNTING DI INDONESIA DALAM KERANGKA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	Jurnal Ilmiah Kesehatan Vol. 12 No. 1 ; Maret 2020 http://journal.tamrin.ac.id/index.php/jikmht/article/view/124	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penulis melakukan focus pada konsep dan ciri Public Private Partnership (PPP) dimana yang berarti sebuah cara modern untuk memfasilitasi sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan atas infrastruktur publik dimana hal tersebut berbeda dengan CSR.
12	Heru Subaris Kasjono, Eko Suryani (Kasjono & Suryani, 2020)	APLIKASI PENCEGAHAN STUNTING "GASING" UNTUK SISWI SMA DI KECAMATAN KALIBAWANG KULON PROGO	Jurnal Nutrisia Vol.22, No.1 (Maret) 2020, pp. 16 – 22 http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/8150/	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa pencegahan stunting dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan pada remaja putri SMA untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih agar mereka lebih peduli dengan kesehatannya. • Program yang dilakukan melalui aplikasi Gerakan Anti Stunting "GASING". Dimana pendekatan yang dilakukan dilatarbelakangi pada kebutuhan masyarakat pada kecanggihan teknologi sehingga

				mudah tersampaikan.
13	Amran Husen, Prince Charles Heston Runtunuwu, Muhlis Suamole (Husen et al., 2022)	MENCEGAH STUNTING MELALUI PROGRAM INTERVENSI SENSITIF	Jurnal Pengabdian Khairun (JPK) Vol. 1 No. 1 Juni 2022 https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jepk/article/download/4451/2838	Dengan melalui program intervensi gizi dengan melibatkan berbagai kelompok atau pihak yang menjadi sasaran dapat menjadi salah satu upaya percepatan dalam pencegahan yang terfokus pada ketersediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, serta pula adanya peningkatan akses pangan yang bergizi oleh pemerintah daerah.
14	Indah Yun Diniaty Rosidi, Arisna Kadir (Indah Yun Diniaty R & Arisna Kadir, 2022)	Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Program 1000 Hpk	Volume 1 Nomor 1 Maret 2022 e-ISSN: 2829-162X Website: https://abdimas.polsaka.ac.id	Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa salah satu upaya penanggulangan stunting yaitu dengan memberikan edukasi atau pengetahuan dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dimana dikhususkan pada wanita usia subur.

Maka dapat dikatakan didalam penelitian yang sudah dijelaskan dalam literature review diatas yang mana peneliti membahas mengenai bahwa dalam proses pencegahan dan penanggulangan stunting melalui *collaborative governance* dengan berbagai macam pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan stunting serta program yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan hal yang membedakan dalam penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan

diteliti yaitu dalam strategi serta program yang dibentuk untuk pencegahan dan penanggulangan yang berbeda pada pemerintahan dan beberapa stakeholders yang terkait pada suatu daerah dalam penurunan angka stunting. Contoh pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmanda & Gurning, 2022) dimana pada penelitian tersebut penulis menganalisis program yang dilakukan oleh OPD atau pihak yang terkait penulis menggunakan teknik analisis SWOT pada program yang dibentuk. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan nantinya adakah hambatan yang terjadi pada program yang dilakukan sehingga program yang dilaksanakan masih belum efektif dan efisien dalam menurunkan angka stunting.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Collaborative Governance

1.6.1.1. Pengertian Collaborative Governance

Diketahui terlebih dahulu bahwa istilah *Governance* sendiri merupakan sebuah istilah yang menjadi dasar atau sering kali digunakan dalam studi ilmu pemerintahan serta dengan istilah lainnya yaitu *Government*, namun kedua istilah tersebut memiliki arti atau makna yang berbeda satu sama lain. *Collaborative governance* memiliki arti dimana sebuah proses atau struktur yang melibatkan beberapa pihak yang terkait dan melintasi batasan organisasinya untuk menggambarkan kersajama yang terjalin formal, aktif, kolektif dan eksplisit.

Menurut Ansell dan Gash (2007:544) mengatakan bahwa:

“A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non – state stakeholders in a collective decision – making process that is formal, consensus – oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:544) dalam (Tilano, 2012) dapat dikatakan sebagai beberapa rangkaian dari pengaturan atau upaya – upaya dimana terdapat keterlibatan beberapa lembaga public yang melibatkan secara langsung stakeholders non – state yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan untuk mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan.

Dalam definisi dari Ansell dan Gash (2007:8) terdapat beberapa model tahap berikut:

1. Kondisi Awal
2. Kepemimpinan Fasilitatif
3. Desain intusional
4. Proses Kolaborasi

Adapula yang memiliki persamaan dalam makna definisi tersebut yang dimana dekemukakan oleh Robert dan Taehyon (2010:2) yang mengatakan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu proses kolektif dari beberapa pihak berkepentingan atau stakeholders yang berkaitan dan memiliki otoritas untuk dapat membuat keputusan yang kolektif.

Disisi lain terdapat pula pengertian *Collaborative Governance* menurut beberapa ahli yakni diantaranya Agranoff dan McGuire dalam Chang (2009:76-77) mengatakan bahwa *Collaborative Governance* sendiri telah menempatkan banyak penekanan pada bentuk kolaborasi yang horizontal secara sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien yang sering melampaui kapasitas dan peran

organisasi publik tunggal, dan pula membutuhkan interaksi diantara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik.

Tidak hanya pernyataan tersebut, berbeda dengan definisi Collaborative Governance yang diuraikan oleh Lemos dan Agrawal (2006:297) dalam (Cahya, 2021) yang mana menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* sendiri tidak hanya terbatas pada stakeholders yang terdiri dari pemerintah dan pula bukan pemerintah tetapi terbentuk atas adanya multipihak governance yang meliputi berbagai sektor yang ada baik sektor privat atau swasta, masyarakat dan komunitas masyarakat atas adanya sinergi peran stakeholders dan penyusunan rencana.

Adapun menurut Tang dan Masmanian (2008:5) mengatakan bahwa:

“A concept that describes the process of establishing, steering, facilitating, operating, and monitoring cross – sectoral organizational arrangements to address public policy problems that cannot be easily addressed by a single organization or the public sector alone. These arrangements are characterized by joint efforts, reciprocal expectations, and voluntary participation among formally autonomous entities, from two or more sector – public, for profit, and nonprofits – in order to leverage (build on) the unique attributes and resources of each.”

Dari definisi Tang dan Masmanian sendiri menekankan pada proses dalam penyelesaian masalah publik yang terjadi dimana dalam penyelesaian tersebut perlu adanya melibatkan dua atau lebih dari sektor publik, profit, dan non profit yang berkaitan dalam kolaborasi yang dilakukan tersebut.

Maka dapat dikatakan dengan didasarkan pendapat dari berbagai para ahli tersebut bahwa *Collaborative Governance* sendiri merupakan sebuah proses yang berasal dari struktur jejaring atau struktur hubungan dari berbagai multiorganisasi lintas sektor yang dimana dalam hubungan tersebut memiliki

tujuan dengan membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama, pencapaian yang konsensus dengan melalui interaksi yang bersifat formal maupun informal yang dimana dalam interaksi tersebut saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama.

1.6.1.2. Tujuan Collaborative Governance

Penerapan kolaborasi dalam sistem pemerintahan yang terselenggara disuatu negara merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam praktik jalannya pemerintahan. Adapun beberapa faktor yang dapat melatarbelakangi adanya kolaborasi yang dilakukan pada setiap sektor.

Dengan diterapkannya kolaborasi pada tiap lembaga tidak lepas dari adanya berbagai alasan atau faktor yang mendorong timbulnya kolaborasi tersebut. Adapun menurut Junaidi (2015:8) dalam (Setiawati, 2020) mengatakan bahwa *Collaborative Governance* sendiri tidak muncul atau tidak akan terjadi secara tiba – tiba dikarenakan kolaborasi tersebut terjadi karena adanya inisiatif dari berbagai pihak yang terlibat serta mendorong untuk melakukan kerjasama dan saling koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan atau terjadi pada publik.

Adapun menurut Ansell and Gash (2007:544) yaitu:

“Collaborative governance has emerged as a response to the failures of downstream implementation and to the high cost and politicization of regulation. It has developed as an alternative to the adversarialism of interest group pluralism and to the accountability failures of managerialism (especially as the authority of expert is challenged). More positively, one might argue that trends toward collaboration also arise from the growth of knowledge and institutional capacity. As knowledge becomes increasingly specialized and distributed and as institutional infrastructures become more complex and interdependent, the demand for collaboration increases.”

Selanjutnya disisi lain terdapat penjelasan yang lebih spesifik yang dikemukakan juga oleh Ansell dan Gash (2007) dalam uraian (Junaidi, 2015) dimana mengemukakan lebih lanjut bahwa collaborative governance ada atau timbul secara sengaja atau sadar karena rencana serta alasan yang timbul maka dapat dikatakan pentingnya melakukan kolaborasi sebagai berikut:

1. Kompleksitas dan ketergantungan antar pihak
2. Adanya konflik antar pihak atau kelompok yang bersifat sulit dihentikan
3. Upaya dalam melakukan suatu hal atau cara baru untuk mencapai legitimasi politik
4. Kegagalan dalam pengimplementasian kebijakan
5. Terjadi ketidakmampuan pada kelompok karena adanya pemisahan kekuasaan
6. Adanya mobilitas kepentingan kelompok
7. Tingginya pengeluaran dan politisi regulasi (Junaidi, 2015).

Sehingga dengan adanya proses kolaborasi tersebut dengan sifat kemunculan dan perkembangannya yang adaptif atau kita ketahui yaitu sengaja diciptakan terhadap suatu permasalahan maka akan timbul adanya tuntutan dari berbagai pihak yang terkait untuk memecahkan permasalahan tersebut sehingga memungkinkan timbul berbagai macam variasi bentuk kolaborasi yang terjadi.

1.6.1.3. Proses Collaborative Governance

Proses kolaborasi merupakan suatu aspek yang cukup penting, dimana dalam kolaborasi sendiri diawali dengan proses dialog bertatap muka hingga

membangun sebuah kepercayaan serta akan berpengaruh pada timbulnya komitmen dan terjadi suatu pemahaman yang sama hingga menimbulkan sebuah keinginan melakukan rencana strategis bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam kolaborasi tersebut.

Dalam proses tersebut pula terdapat beberapa tahapan yang ada, walaupun disisi lain proses tersebut sulit untuk dilakukan karena memiliki karakter atau pribadi yang berbeda pada tiap pihak stakeholder yang terkait.

Menurut Ansell dan Gash (2007:558-561) dalam (Harmawan et al., 2017) terdapat 5 tahapan yang ada, antara lain:

1. Dialog tatap muka (Face to face)
2. Membangun kepercayaan (Trust building)
3. Komitmen terhadap proses (Comitment to process)
4. Berbagi pemahaman (Share understanding)
5. Hasil sementara (Intermediate outcomes)

1.6.2. Stunting

1.6.2.1. Pengertian Stunting

Stunting dapat dikatakan sebagai kondisi gagal pertumbuhan pada anak (yang terjadi pada pertumbuhan tubuh dan otak) dimana diakibatkan karena terjadinya kekurangan gizi yang dialami anak dalam waktu yang lama. Sehingga, menyebabkan ukuran anak akan lebih pendek dari ukuran anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Terdapat pandangan menurut (Sandjojo, 2018) mengatakan bahwa stunting merupakan suatu kondisi gagal pada pertumbuhan anak balita yang

disebabkan oleh faktor multidimensi atau kekurangan gizi kronis hingga berdampak pada anak yang akan memiliki ukuran yang terlalu pendek untuk usianya karena asupan gizi yang diterima kurang jumlahnya serta tidak sesuai dengan kebutuhannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Adapun intervensi pada stunting paling menentukan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

1.6.2.2. Penyebab Stunting

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, diketahui bahwa stunting yang terjadi pada anak merupakan proses yang kumulatif dimana terjadi sejak kehamilan hingga perlu diketahui pula penyebab dari stunting sendiri sangatlah kompleks.

Didasarkan pada temuan oleh para peneliti terdahulu, stunting disebabkan oleh faktor gizi buruk yang menjadi faktor utama yang dialami oleh anak dan ibu hamil, hal ini pun tidak terbantahkan atau dapat dikatakan faktanya sebagai salah satu faktor atau penyebab terjadinya stunting. Namun secara lebih detail, terdapat beberapa faktor yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Faktor Langsung
 - 1) Faktor Genetik

Banyak dilihat dari hasil beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa ukuran atau tinggi badan dari orang tua sangat mempengaruhi pertumbuhan atau kejadian stunting yang terjadi pada anak. Sehingga dari hal tersebut genetik dari orang tua merupakan faktor dasar untuk mencapai pada hasil proses pertumbuhan. Dimana pada ukuran tubuh ibu yang pendek akan

mempunyai resiko memiliki anak stunting 2,34 kali dibanding dengan ibu yang memiliki ukuran tinggi badannya yang normal. Sedangkan untuk ayah yang memiliki ukuran tinggi badan yang pendek <162 cm akan berpengaruh pada faktor resiko stunting kepada ada berumur 1-2 tahun hingga beresiko 2,88 kali lebih besar dari ukuran normal.

2) Faktor Ibu

Ibu dapat juga menjadi salah satu faktor yang menimbulkan stunting ada karena nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ibu akan berpengaruh, begitu pula jika nutrisi yang buruk selama 10 kehamilan, prekonsepsi dan laktasi. Bahkan disisi lain bayi dapat beresiko mengalami stunting juga terjadi karena terjadinya anemia pada ibu hamil, terdapat pada data dari puskesmas Halmahera yang menunjukkan dimana anemia yang terjadi pada ibu mengandung sebesar 49% dengan kejadian BBLR sebesar 1,29 kali dibandingkan ibu yang sedang hamil tanpa mengalami anemia. (Candra, 2020)

Tidak hanya sebelum kelahiran, bahkan pasca kelahiran seperti pemberian ASI pada anak pula dapat menjadi faktor terjadinya stunting pula. Terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa dengan melakukan penundaan atau delayed initiation maka akan meningkatkan angka kematian bayi.

b. Faktor Tidak Langsung

1) Faktor sosial dan ekonomi

Status perekonomian yang memiliki tingkat yang rendah dianggap memiliki dampak yang sangat berpengaruh atau signifikan pada anak karena berpengaruh pada makanan yang dikonsumsi dengan berdasarkan gizi atau nutrisi yang dikonsumsi pada anak dan bayi. Sehingga jika mengonsumsi dengan jumlahnya yang sedikit pada bahan dan pangan untuk pertumbuhan pada anak sebagai sumber nutrisi, protein, vitamin dan mineral maka akan menimbulkan terjadinya resiko kekurangan gizi.

Bahkan dengan adanya perekonomian yang rendah maka untuk melakukan daya beli sendiri masih rendah untuk mendapatkan kualitas dan kuantitas bahan pangan yang dikonsumsi. Sehingga hal tersebut juga memiliki resiko terjadinya permasalahan pada pertumbuhan anak karena kurang terpenuhinya zat gizi yang lengkap.

2) Pendidikan dan pengetahuan

Dalam penelitian Sulastri (2012) mengatakan bahwa pendidikan dan pengetahuan ibu yang rendah juga akan mempengaruhi terjadinya stunting pada anak, dikarenakan pendidikan serta pengetahuan pola asuh dan perawatan anak akan berpengaruh pada pertumbuhan anak.

c. Faktor Lingkungan dan Infeksi

Faktor lingkungan dapat menjadi salah satu penyebab contohnya pada sanitasi atau kebersihan lingkungan rumah tangga. Dimana ketika keadaan lingkungan rumah tidak bersih maka akan menimbulkan penyakit yang akan berpengaruh pada pertumbuhan anak.

Hingga dari lingkungan tersebut akan timbul terjadinya infeksi pada anak. Bahkan malnutrisi yang terjadi akibat lingkungan atau sanitasi dari air bersih atau makanan dapat meningkatkan risiko infeksi yang akan terjadi pada anak kurang gizi, serta daya tahan tubuh hingga akan mudah terjerang penyakit.

1.6.3. Evaluasi Kebijakan

1.6.3.1. Pengertian Kebijakan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian kebijakan merupakan sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar serta dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pemerintah, organisasi dan sebagainya seperti pernyataan cita – cita atau visi, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Istilah kebijakan atau “Policy” pula digunakan untuk menunjuk sebuah perilaku seorang aktor atau pejabat dalam kelompok pemerintah, serta organisasi ataupun pada kelompok tertentu. Adapun menurut Carl J Federick sebagaimana dalam Leo Agustino (2008:7) yang dimana mengartikan

kebijakan merupakan sebagai serangkaian tindakan atau sebuah kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan – hambatan serta kesempatan – kesempatan yang ada terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Sisi lain menurut Greer dan Paul Hoggett (1999) mengatakan bahwa kebijakan merujuk pada sebuah jaringan pada keputusan atau sejumlah tindakan yang dimana lebih dari sekedar keputusan spesifik dengan cara atau alat dan tujuan dengan fokus pada tujuan yang diinginkan.

Maka berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa munculnya ide kebijakan adanya keterlibatan sebuah perilaku yang memiliki maksud dan tujuan karena dari latar belakang tersebut sebuah kebijakan harus menunjukkan sesungguhnya yang dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam sebuah kegiatan pada suatu masalah.

1.6.3.2. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut (Rushananto, 2014) mengatakan bahwa sebuah keputusan – keputusan yang dimana memaksa atau mengharuskan untuk orang – orang yang dibuat oleh pemegang kekuasaan atau otoritas publik dengan sifat tataran strategis atau garis besar. Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan (1970) dalam (Herdiana, 2018) yaitu “a projected program of goals, values and practices” yang berarti sebuah program tujuan, nilai, dan praktik yang diproyeksikan oleh sebuah kelompok atau pemerintah. Adapun menurut Anderson (2006) mengatakan bahwa:

“Policy is defined as a relatively stable, purposive courses of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”

Berdasarkan pada pandangan diatas, adapun penjelasan menurut Thoha (2002) mengatakan dengan arti yang lebih luas bahwa kebijakan sendiri memiliki 2 aspek, yaitu dimana kebijakan merupakan prakata sosial, bukan sebuah acara atau event tunggal atau yang terisolir. Dan yang kedua dimana kebijakan adalah suatu peristiwa atau kejadian yang ditimbulkan baik dengan tujuan untuk mendamaikan sebuah konflik atau untuk menciptakan kondisi yang intensif terhadap tindakan bersama untuk menciptakan tujuan.

1.6.3.3. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi yang kita ketahui biasanya memiliki tujuan yaitu untuk menilai sejauh mana keefektivan atau keberhasilan yang dilakukan atau tercapai pada kebijakan publik dengan guna untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Penjelasan evaluasi kebijakan yang dijelaskan oleh Muhajdir dalam Widodo (2008) mengatakan bahwa sebuah proses dimana untuk menilai seberapa jauh hasil yang terjadi pada suatu kebijakan publik tersebut dengan membandingkan pada hasil yang diperoleh pada kebijakan publik yang telah ditentukan atau diterapkan tersebut dengan tujuannya.

Adapun menurut Situmorang yang dimana mengatakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan dengan tujuan untuk menemukan penyebab atau permasalahan dari sebuah kegagalan yang dihasilkan dalam kebijakan dan akankah berdampak. Maka, tidak heran jika sebuah evaluasi dapat dikatakan

sebagai kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan pada tahapan akhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan yang ada.

Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2008) mengatakan bahwa secara umum evaluasi kebijakan yaitu sebuah kegiatan yang dimana menyangkut atau terdapat penilaian kebijakan yang dimana pada penilai tersebut mencakup komponen substansi, implementasi, dan dampaknya pada pelaksanaan kebijakan.

a. Tipe atau Bentuk Evaluasi Kebijakan

Tipe atau bentuk evaluasi kebijakan menurut Bingham dan Felbinger, Howlet dan Ramesh (1995) dalam (Rushananto, 2014) bahwa mengklasifikasi evaluasi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Evaluasi administratif, yang dimana berhubungan dengan evaluasi sisi administratif – anggaran, efisiensi, serta biaya dari proses kebijakan yang terdapat di dalam pemerintah.
- 2) Evaluasi *judicial*, yang dimana pada bentuk ini berhubungan dengan isu keabsahan hukum tempat pada kebijakan diimplementasikan, termasuk pada adanya kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- 3) Evaluasi politik, yaitu dimana pada evaluasi ini kegiatan berhubungan dengan menilai sejauh mana penerimaan pada konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

Sedangkan pada tipe yang dikemukakan oleh James Anderson dalam Winarno (2008:229) terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan yang dimana diperkenalkan pada dasar pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, diantaranya yaitu:

- 1) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Dimana pada tipe ini evaluasi kebijakan dianggap atau dipahami sebagai kegiatan fungsional yang berarti dianggap sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- 2) Evaluasi yang berfokus pada bekerjanya kebijakan atau program – program tersebut. Sehingga pada tipe evaluasi ini lebih memfokuskan pada sesuatu yang berhubungan pada kejujuran atau efisiensi dalam pelaksanaannya.
- 3) Evaluasi kebijakan sistematis, yang dimana pada tipe evaluasi kebijakan ini melihat secara obyektif program – program atau kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya untuk melihat tujuan – tujuan yang telah dinyatakan tercapai.

b. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Pada tahap evaluasi kebijakan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penilaian suatu kebijakan publik yang telah dibentuk. Evaluasi sendiri memiliki fungsi dalam suatu kebijakan untuk perlunya dievaluasi. Adapun fungsi yang telah dikemukakan oleh William Dunn (1998) dalam analisis kebijakan diantaranya yaitu:

- 1) Memberikan informasi yang dapat dipercaya dan terbukti valid yang berarti dapat mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai dalam memecahkan masalah.
- 2) Memberi sumbangan terhadap klarifikasi dan kritik pada nilai – nilai yang menjadi landasan atau dapat dikatakan mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik dengan cara mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- 3) Memberikan sumbangan pada aplikasi atau implemtasi metode – metode analisis kebijakan lainnya, termasuk dalam perumusan masalah maupun rekomendasi pemecahan masalah.

1.6.4. Penta Helix

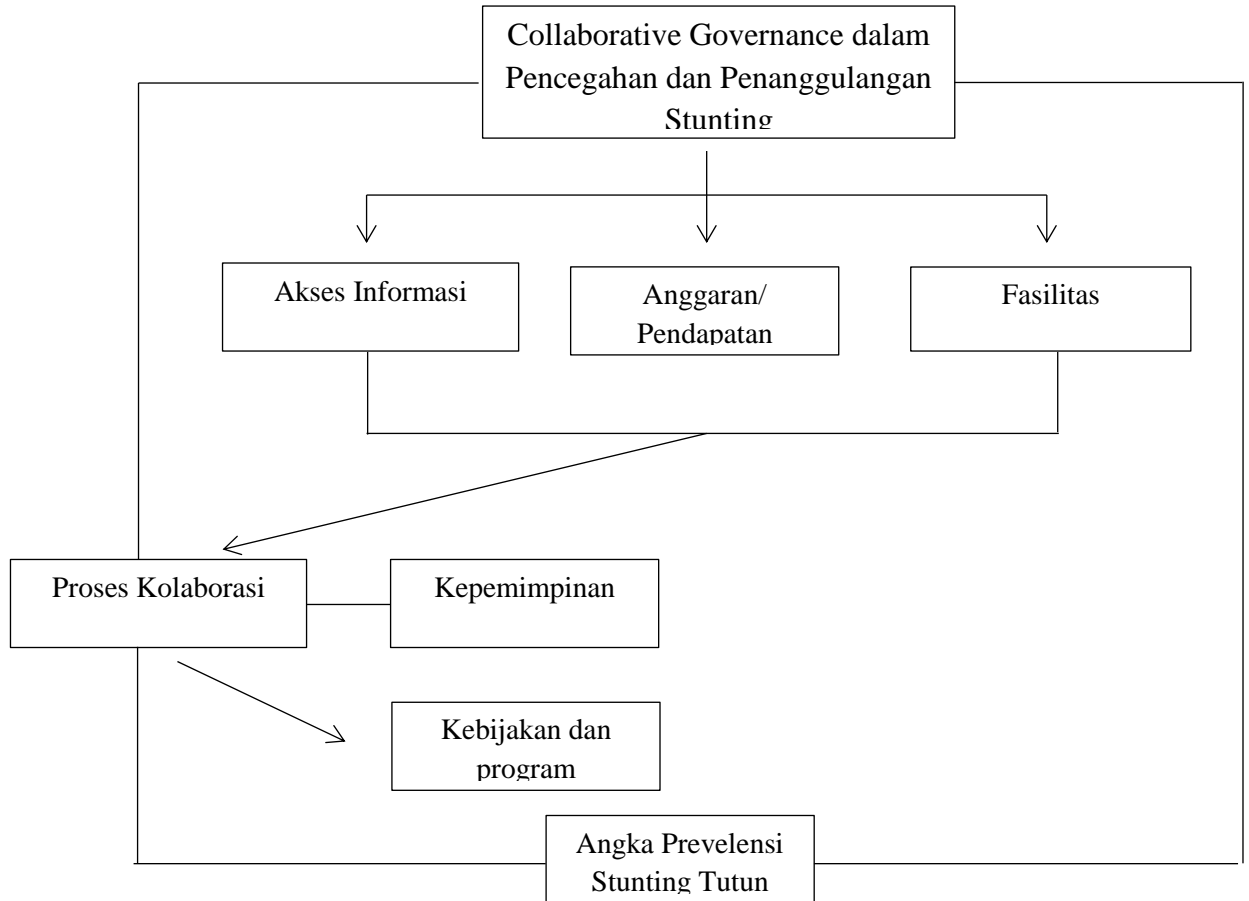
Menurut Soemaryani (2016) mengatakan bahwa model pentahelix merupakan sebuah referensi dalam mengembangkan sinergi antara instansi terkait seperti *business, government, civil society, academician dan mass media* (BGCAM) dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun awal mula terbentuknya model Pentahelix sendiri terbentuk dari model dari pengembangan model dari TripleHelix atau 3 pihak dengan model

QuadrupleHelix atau 4 pihak (Carayannis & Campbell, 2009; Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Lindmark et al., 2009; Mulgan, 2006).

Menurut Rampersad, Quester, & Troshani (2010) mengatakan bahwa kolaborasi pentahelix sendiri memiliki peran yang cukup penting untuk menjadi pendukung dalam mencapai tujuan inovasi dan kemajuan sosial ekonomi. Selain itu, pada model ini juga dapat digunakan untuk menciptakan sebuah ekosistem yang berdasarkan pada sebuah kreatifitas dan pengetahuan, yang dimana pada model ini diharapkan adanya sebuah solusi untuk pengembangan kreatifitas, teknologi dan inovasi industri kreatif.

Dengan dilakukannya kolaborasi melalui model pentahelix atau dengan 5 (lima) pihak atau aktor kepentingan maka diharapkan dengan kolaborasi tersebut dapat mewujudkan sebuah bentuk kebijakan yang didukung secara sinergis oleh beberapa sumber daya yang saling berkaitan (Luh & Dewi, 2019). Maka dalam model pentahelix tersebut pun dapat sangat berguna untuk menyelesaikan sebuah masalah pada multi pihak yang menjadi aktor kepentingan dimana mewakili pada berbagai kepentingan (Lindmark et al., 2009).

1.6.5. Kerangka Pikir



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu unsur definisi yang menjelaskan sesuatu konsep masalah yang telah ditentukan. Berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan maka dapat dikemukakan definisi dari beberapa variabel tersebut, yaitu:

a. *Collaborative Governance*

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas dapat ditarik pengertian bahwa *Collaborative Governance* merupakan suatu proses kolektif dari beberapa pihak berkepentingan atau stakeholders yang berkaitan dan pada hubungan horizontal baik sector privat atau swasta, masyarakat dan komunitas masyarakat untuk dapat membuat keputusan yang kolektif.

b. Stunting

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas dapat ditarik pengertian bahwa stunting dapat dikatakan sebagai kondisi gagal pertumbuhan pada anak yang diakibatkan karena terjadinya kekurangan gizi kronis yang dialami anak dalam waktu yang lama hingga akan berdampak pada anak yang akan memiliki ukuran yang terlalu pendek untuk usianya.

c. Evaluasi Kebijakan

Pengertian Evaluasi Kebijakan yang dapat diambil berdasarkan beberapa ahli yang telah kemukakan yaitu dimana merupakan proses pada tahapan akhir untuk menilai seberapa jauh hasil yang terjadi pada suatu kebijakan publik tersebut dengan membandingkan pada hasil yang diperoleh pada kebijakan publik yang telah ditentukan atau diterapkan tersebut dengan tujuan untuk menemukan penyebab atau permasalahan dari sebuah kegagalan yang dihasilkan dalam kebijakan dan akankah berdampak dengan

mencakup komponen substansi, implementasi, dan dampaknya pada pelaksanaan kebijakan.

d. *Pentahelix*

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya oleh beberapa ahli, maka dapat ditarik pengertiannya bahwa pentahelix merupakan sebuah model perkembangan kolaborasi menjadi 5 pihak yang dapat menjadi sebuah solusi atau jawaban dari suatu masalah dari multi pihak hingga menuju tujuan yang ingin dicapai.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator – indikator dari penjelasan yang terdapat pada penelitian dan diturunkan ke dalam kerangka teori. Definisi operasional sendiri dapat mempermudah dalam penelitian dalam hal proses menganalisis data dalam penyajian pengaruh ataupun masalah yang ada pada penelitian dengan tujuan dapat memberi jawaban pada penelitian tersebut.

Adapun definisi operasional yang terdapat pada penelitian ini dengan mengambil variable dari teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:8) dalam model tahapan yang dikemukakan hingga. Berikut definisi operasional yang terdapat pada penelitian.

Tabel 1.2 Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Dialog Tatap Muka (Face To Face)	Terbentuknya Kolaborasi pihak – pihak terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Pemerintah akan kurangnya pelayanan pencegahan stunting • Musyawarah atau rapat koordinasi pembentukan program • Tujuan yang ingin dicapai bersama pada pihak terkait
Membangun Kepercayaan (Trust Building)	Rembuk Stunting Penetapan Kolaborasi dan Program	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa situasi dan rancangan rencana kegiatan • Stakeholders yang Terlibat dalam Kolaborasi • Pembentukan Tim atau Kelompok Kerja
	Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang digunakan dalam program • Akses data yang mudah bagi pihak yang terkait termasuk pada non pemerintahan
Komitmen Terhadap Proses (Commitment To Process)	Peraturan atau Regulasi Jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan peraturan dasar atau legitimasi dalam kolaborasi yang jelas diantara pihak terkait dalam kolaborasi
	Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Stunting	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipatif pihak yang memiliki tujuan bersama • Konsistensi pelaksanaan program atau kebijakan pada proses kolaborasi • Sistematis dan strategis dalam menjalankan proses kolaborasi
Saling Memahami (Shared Understanding)	Informasi dan pengetahuan proses kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman dan tujuan yang sama dari proses collaborative governance • Berbagi informasi dan pengetahuan
Hasil Sementara (Intermediate Outcomes)	Keberhasilan pada Kebijakan atau Program	<ul style="list-style-type: none"> • Pengimplementasian dari program atau kebijakan yang telah dibentuk oleh stakeholders • Target atau tolak ukur keberhasilan program
	Hambatan atau kegagalan pada proses	<ul style="list-style-type: none"> • Hambatan atau permasalahan pada pencegahan atau penanggulangan stunting • Proses kolaborasi pada pihak - pihak yang terkait dalam program • Anggaran serta fasilitas yang ada

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan jenis penelitian yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Pada metode ini, merupakan suatu metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dan studi kasus. Dalam pendekatan ini, menurut Nazir (2014) merupakan suatu metode yang meneliti sebuah fenomena sosial yang terdapat pada seperti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang serta peristiwa atau keadaan dengan menggunakan program.

Pendekatan kualitatif deskriptif memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, sedangkan studi kasus memiliki tujuan yaitu untuk mempelajari bagaimana peristiwa atau keadaan tersebut terjadi secara sistematis dalam jangka waktu yang lama.

1.9.2. Unit Analisis

Unit analisis dapat dikatakan sebagai salah satu komponen yang terdapat pada penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016; 298), mengatakan bahwa unit analisis merupakan satuan yang di teliti dapat berupa individu, kelompok, benda atau sebuah latar peristiwa sosial seperti pada aktivitas individu atau kelompok yang menjadi subjek penelitian.

Sehingga dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasannya, unit analisis berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kasusnya. Dengan demikian

pada penelitian ini dapat dikatakan bahwa unit analisisnya yaitu pemerintahan Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa stakeholders yang berkaitan dengan pemerintahan dalam proses *collaborative governance* di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah yang terdiri dari pemerintah, media, pelaku bisnis serta tokoh masyarakat.

1.9.4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan pada sumber, yang dikelompokkan menjadi dua (2) yakni, sebagai berikut.

1) Data Primer

Data primer merupakan data asli yang didapatkan dari sumber asli atau tangan pertama yang berasal dari narasumber atau responden. Maka data primer dalam penelitian ini yaitu pelaku bisnis serta tokoh masyarakat serta BAPPEDA, Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta beberapa SOPD Kotawaringin Barat

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data pendukung yang tidak diambil langsung dari informan seperti menggunakan berbagai studi literatur yang berkaitan atau dokumen.

1.9.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dikarenakan dalam penelitian ini Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri merupakan wilayah yang dapat dikatakan sebagai wilayah lokus stunting.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In Depth Interview*)

Menurut Sugiyono, (2016:231) wawancara ialah dimana terdapat dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat diinterpretasikan sebuah maknanya dalam suatu topik tertentu yang ingin diteliti. Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu sumber data sangat penting. Teknik wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab baik secara tertulis dengan menyediakan pertanyaan tertulis sehingga informan dapat menuis jawaban tersebut atau dengan cara lisan Tanya jawab kepada informan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara mendalam yang dimana dalam metode ini bertujuan untuk mendapatkan berbagai macam bentuk informasi yang didapat dari informan atau responden dengan melalui interaksi yang secara luwes atau informal tetapi dengan susunan kata nya disesuaikan dengan responden.

Aktor utama dalam wawancara ini adalah pemerintah yang mempunyai peran penting dalam permasalahan yaitu,

Tabel 1.3 Informan dalam penelitian

No	Instansi	Jumlah	Narasumber
1	Pemerintah	1 (satu) orang	<ul style="list-style-type: none"> • Sudarwanto, S.Sos (BAPPEDA) • I Ketut Djabal Wahjunirahman (Dinas Kesehatan) • Edi Darmawan (Dinas P2AP3KB) • Andi Soleh (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
2	Media	1 (satu) orang	Beben Sutarus Haidi, S.kom, MM (Dinas Komunikasi dan Informatika)
3	Akademisi	1 (satu) orang	Brian L. Djumaty S.Si, M.Si (Kaprodi Ekonomi Pembangunan Universitas Antakusuma)
4	Dunia Usaha atau UMKM	1 (satu) orang	Usma (PT. GSPP (Gunung Sejahtera Puti Pesona))
5	Komunitas Masyarakat	1 (satu) orang	Lisna sebagai Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga)

b. Observasi Non – Partisipan

Dalam teknik observasi menurut Julmi (2020) mengatakan bahwa observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non – partisipan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian observasi non partisipan yaitu dimana posisi peneliti hanya sebagai pengamat objek yang bersifat independen dengan hanya

mengamati, tanpa terlibat dalam berinteraksi secara langsung pada objek penelitian.

Diketahui observasi partisipan merupakan observasi yang dilakukan dalam penelitian eksploratif dimana dalam penelitiannya meneliti mengenai pada aspek sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain bahkan dengan hal tersebut observasi partisipan yang berarti kedalaman partisipasi tergantung pada tujuan dan situasi. Maka dapat dikatakan observasi non – partisipan merupakan metode dimana pada hal ini tidak mengambil bagian dalam kehidupan observasi.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti sebagai penyempurna dari data wawancara atau observasi yang telah didapatkan yang belum cukup sempurna. Data dokumen sendiri memiliki 3 jenis menurut O'Leary (2014) yaitu:

1) Publik Documents

Pada dokumen ini contohnya seperti transkrip siswa, pernyataan misi, laporan tahunan, rencana strategis dan lain – lain.

2) Personal Dokumen

Pada dokumen ini merupakan catatan personal yang dibuat dari seorang individu ataupun informan yang pernah dialami atau dirasakan oleh informan. Contohnya seperti email, blog, laporan insiden, surat kabar, refleksi/jurnal, dan lembar memo.

3) Bukti Fisik

Bukti fisik dalam penelitian ini diartikan sebagai benda – benda yang ditemukan dalam lingkungan studi penelitian. Contohnya seperti brosur, buku pegangan, brosur dan lain – lain.

1.9.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2018:482) mengatakan bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis sebuah data yang telah diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan dengan melakukan mengorganisasikan data ke dalam kategori yang ditentukan, dijabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesis, menyusun pola, serta memilah ke dalam hal yang penting, dan membuat kesimpulan agar dapat mudah dipahami.

Sehingga teknik analisis data adalah suatu metode atau cara yang merupakan bagian penting dalam penelitian dimana sebuah kegiatan untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan serta mengambil kesimpulan.

Adapun beberapa teknik analisis data sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, dimana dalam hal ini merupakan kegiatan memilih hal – hal pokok dan merangkum serta memfokuskan kepada hal hal yang dianggap penting, lalu mencari tema dan polanya.

Maka dengan itu data penelitian yang sudah direduksi atau dipilih akan memperlihatkan gambaran yang jelas dan tepat dan nantinya akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan tahap reduksi, selanjutnya adalah menyajikan data. Dimana dalam penelitian kualitatif, penyajian data merupakan sebuah kumpulan informasi yang sudah tersusun yang sudah tertuju yang akan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa bentuk table, grafik, *flowchart*, *pictogram* dan sejenisnya.

Tujuan dalam penyajian data yaitu untuk meningkatkan pemahaman pada sebuah kasus yang akan dijadikan sebagai acuan dalam mengambil tindakan yang berdasarkan pemahaman dan analisis pada penyajian data. Dimana dengan penyajian data maka akan terorganisir atau tersusun dalam pola relasi atau hubungan sehingga akan mudah memperoleh hasil atau dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya yaitu pada tahap terakhir disebut dengan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018:252-253) mengatakan bahwa kesimpulan yang terdapat dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi memiliki kemungkinan juga tidak atau masih tidak jelas, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian masih sangat

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian tersebut berada dilapangan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kesimpulan merupakan sebuah hasil atau temuan baru yang berfokus pada rumusan masalah sebelumnya serta hasil tersebut dapat berupa gambaran objek atau deskripsi yang masih belum jelas menjadi jelas.